

Pengaruh Personal Blackground, Political Culture dan Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Bireuen

This study aims to know the influence of personal background, Political Culture and Financial Managemen System to the Role of Regional Parliament in Regional Financial Supervision (Case Study at the office of Regional Parliament of Bireun Regency). The data used in this study in the primary data taken from 40 respondents. The sampling technique used is Census sampling.the method used to analyze the relationship between independent variables and the dependent variables is multiple linear regressin methods and classical assumption test. The result of the research shows that partially Personal Background has an effect on the role of Regional Parliament in the regional finance supervision at the office of Regional Parliament of Bireuen Regency, Political Culture has an effect on the role of Regional Parliament in the regional finance supervision of the office of Regional Parliament of Bireuen Regency, the financial Management System influences the role of Regional Parliament in the regional Financial supervision at the office of Regional Parliament of Bireun Regency. Simultaneously , Personal Background, political culture, and financial management system influence on the role of Regional Parliament in the supervision of Regional Financial Supervision of Regional Parliament of Bireuen Regency.

Keywords : *Personal Background, Political culture, Financial Management System, Role of Regional Parliament*

Muhammad Yusra
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikussaleh*

Email : myusra@unimal.ac.id

PENDAHULUAN

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebagai pengontrol arah kebijakan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berwenang dan berkewajiban untuk mengawasi anggaran daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD (pasal 132).

Di sisi lain, dalam mewujudkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah juga di pengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Semakin baik sistem yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan yang diberikan oleh anggota DPRD.

Fenomena yang terjadi pada Tahun 2014 adanya ketidak patuhan terhadap perundang-undangan dimana DPRK Kabupaten Bireuen pada Tahun 2014 tidak menyampaikan pertanggungjawaban atas Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebesar Rp. 168.000.000,- Masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu rendahnya peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam keseluruhan siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Lemahnya kontrol pemda dan DPRD terhadap kebijakan keuangan daerah menyebabkan perencanaan yang tidak optimal dalam penyusunan APBD.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah di tingkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Personal Background*

Menurut Sari (2016) *Personal background* merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Indikator *Personal Background*

Personal background atau dapat disebut juga latar belakang pribadi anggota Dewan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari (Winarna, 2006) dalam Abdillah (2008) :

1. Asal Komisi
2. Lama Bekerja di DPRD
3. Tingkat Pendidikan
4. Bidang Pendidikan
5. Pengalaman Mengikuti Pelatihan
6. Latar Belakang Pekerjaan
7. Pengalaman Organisasi

Pengertian *Political Culture*

Budiardjo (2008: 15) menjelaskan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Menurut Abdillah (2008) *political culture* (budaya politik) anggota DPRD meliputi :

1. Pengalaman Politik
2. Latar Belakang Partai Politik
3. Latar Belakang Ideologi Partai Politik
4. Jumlah Partai Politik yang Pernah Diikuti

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

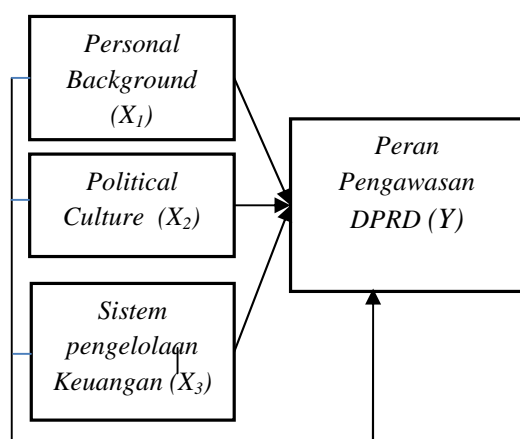
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.



Gambar 1. Model kerangka konseptual

METODOLOGI

Data

Objek pada penelitian ini adalah mengukur Pengaruh *Personal Background*, *Political Culture* dan sistem pengelolaan keuangan Terhadap Peran DPRD Dalam pengawasan Keuangan Daerah Studi Kasus pada Kantor DPRK Kabupaten Bireuen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Bireuen yang berjumlah 40. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus (Sampling Jenuh) artinya semua populasi dijadikan sebagai sampel.

Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan meliputi: Uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang dapat diperoleh dalam analisis adalah:

$$Y = + 1X_1 + 2X_2 + 3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

$1 X_1$: *Personal Background*

$2 X_2$: *Political Culture*

$3 X_3$: Sistem Pengelolaan Keuangan

e : Tingkat kesalahan pengganggu / error

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2005:45), Validitas data dapat diukur dengan membandingkan r_{hasil} dengan r_{tabel} (r product moment), dimana jika :

- Jika r_{hasil} positif serta $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut valid.
- Jika r_{hasil} tidak positif serta $r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

R_{tabel} dihasilkan dari *degree of freedom* (df) = n-k-1, dimana n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2005 : 45), berarti df = 40-3-1 = 36, dengan tingkat signifikan 5% di dapat angka pada r tabel = 0,270 (uji satu sisi) dan 0, 320 (Uji dua sisi). Untuk lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

Pertanyaan	Nilai r_{hasil}	Nilai r_{tabel}	Ket
X1			
x1.1	,798	0,320	Valid
x1.2	,827	0,320	Valid
x1.3	,780	0,320	Valid
x1.4	,793	0,320	Valid
x1.5	,834	0,320	Valid
X2			
x2.1	,837	0,320	Valid
x2.2	,674	0,320	Valid
x2.3	,883	0,320	Valid
x2.4	,860	0,320	Valid
x2.5	,760	0,320	Valid
x2.6	,761	0,320	Valid
x2.7	,769	0,320	Valid
X3			
x3.1	,933	0,320	Valid
x3.2	,763	0,320	Valid
x3.3	,925	0,320	Valid
x3.4	,604	0,320	Valid
x3.5	,680	0,320	Valid
x3.6	,648	0,320	Valid
x3.7	,882	0,320	Valid
Y			
y1	,853	0,320	Valid
y2	,765	0,320	Valid
y3	,727	0,320	Valid
y4	,580	0,320	Valid
y5	,882	0,320	Valid

Sumber : Hasil Penelitian (2018) di olah

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* merupakan nilai dari r_{hasil} . Kemudian nilai r_{hasil} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Dengan nilai = 0.05 dan df = N - k- 1 = 40 - 3 -1 = 36, maka

diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,320. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan angket sah dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reabilitas dalam peneltian ini, dapat dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas

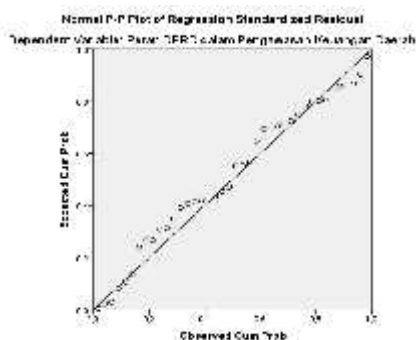
Variabel	Alpha	Batasan	Ket
<i>Personal Background</i>	0,920	0,60	Realibel
<i>Political Culture</i>	0,892	0,60	Realibel
Sistem Pengelolaan Keuangan	0,659	0,60	Realibel
Peran DPRD	0,637	0,60	Realibel

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Berdasarkan hasil *out put* SPSS 20.0 pada Tabel di atas dapat di simpulkan bahwa untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,60. Karena seluruh pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, maka data hasil kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk di uji lebih lanjut.

Uji Normalitas

Grafik 1. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil *out put* SPSS 20.0 pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolenaritas

Uji Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian

multikolonieritas adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Personal Bacground</i>	,821	1,219
	<i>Political Culture</i>	,963	1,038
	Sistem Pengelolaan Keuangan	,849	1,178

a. Dependent Variable: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi dimana hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan dari hasil Uji analisis regresi linier berganda dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS.20.0, dapat dilihat pada tabel 4 (terlampir).

Berdasarkan tabel 4, persamaan ditulis sebagai berikut :

$$Y = 1,635 + 0,201 X_1 - 0,191 X_2 + 0,524 X_3 + e$$

Uji Koefisien Korelasi (R) Dan Determinasi (R²)

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien korelasi disajikan pada tabel 5 (terlampir).

Berdasarkan tabel 5, maka dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,799 menunjukkan bahwa kuat hubungan antara variabel independen (*personal background*, *political culture* dan Sistem Pengelolaan Keuangan) terhadap variabel Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 79,9 %. Nilai R² adalah 0,639 (63,9%), hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel variabel independen (*personal background*, *political culture* dan Sistem Pengelolaan Keuangan) sebesar 63,9 %, sedangkan sisanya sebesar 36,1 % dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel *personal background* (X₁), *political culture* (X₂) dan Sistem Pengelolaan Keuangan (X₃).

Pengujian Secara Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap

variabel dependen secara statistik. Pengujian yang digunakan adalah dengan ketentuan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0.05$ maka menerima hipotesis. Dari hasil olah data SPSS 20,0 seperti terlihat pada tabel 4 (terlampir), maka nilai t_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* (df) untuk uji parsial 2 arah pada sampel 40 $df = N - k - 1$ yaitu $40 - 3 - 1 = 36$ untuk hipotesis dengan nilai t pada signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai t_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 1,688.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji signifikan simultan yaitu uji F, untuk menunjukkan apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Dari hasil olah data SPSS 20,0 seperti yang terlihat pada tabel 6 (terlampir), maka nilai F_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* (df) untuk uji parsial 2 arah pada sampel 36, $df = N - k - 1$ yaitu $40 - 3 - 1 = 36$ dengan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 86$ untuk hipotesis dengan nilai F pada signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 2,710.

Dari tabel 6 juga dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 21,232 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 pada taraf kepercayaan 95%. Sedangkan F_{tabel} diperoleh nilai sebesar 2,710 pada $\alpha = 0.05$. dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $21,232 > 2,710$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0.05$. Dari Hasil uji F ini berarti menerima H_4 .

PEMBAHASAN

Pengaruh Personal Background Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai t_{hitung} dari *Personal Background* sebesar 2,855 dengan nilai signifikannya adalah 0,007, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.688 artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,855 > 1,688$). Maka keputusannya menerima H_1 , yang artinya Secara parsial *Personal Background* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Pada Kantor DPRK Kabupaten Bireuen.

Pengaruh Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai t_{hitung} dari *political culture* sebesar 2,843 dengan nilai signifikannya adalah 0,007, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.688 artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,843 > 1,688$). Maka keputusannya menerima H_1 , yang artinya Secara parsial *political culture* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Pada Kantor DPRK Kabupaten Bireuen. *Political culture* merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. *Political culture* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, dan

ideologi partai politik tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan asal partai politik dan asal komisi berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah..

Pengaruh Sistem pengelolaan Keuangan daerah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai t_{hitung} dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,899 dengan nilai signifikannya adalah 0,000, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.688 artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,899 > 1,688$). Maka keputusannya menerima H_3 , yang artinya Secara parsial sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Pada Kantor DPRK Kabupaten Bireuen.

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan politik, dan lain sebagainya (Yudono, 2002 dalam Jakawinarna, 2006). Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran, dan tentunya good governance nantinya akan mudah dicapai dan diterapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka penulis mengemukakan kesimpulan:

1. *Personal Background* berpengaruh terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRK Bireuen. Ini ditunjukkan dari koefisien (1) *Personal Background* (X_1) sebesar 0,201.
2. *Political Culture* berpengaruh terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRK Bireuen. Ini ditunjukkan dari koefisien (2) *Political Culture* (X_2) sebesar - 0,191.
3. Sistem Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRK Bireuen. Ini ditunjukkan dari koefisien (3) nilai Sistem Pengelolaan Keuangan sebesar 0,524.
4. *Personal Background, Political Culture* dan Sistem Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRK Bireuen. Ini ditunjukkan dari Koefisien (1) *Personal Background* (X_1) sebesar 0,201, Koefisien (2) *Political Culture* (X_2) sebesar - 0,191. Dan

Koefisien (β_3) Sistem Pengelolaan Keuangan sebesar 0,524.

Saran

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantara adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPRK, di harapkan untuk mampu mengawasi keuangan daerah sehingga akan

tercipta sistem pengelolaan sesuai dengan perundang undangan.

2. Bagi penelitian selanjutnya variabel independen yang digunakan harus lebih dikembangkan seperti menambahkan akuntabilitas. Pengembangan ini perlu dilakukan mengingat banyak variabel lain yang berperan dalam meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Tabel 4 .Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,635	,521		3,136	,003
	Personal Bacground	,201	,070	,316	2,855	,007
	Political Culture	-,191	,067	-,290	-2,843	,007
	Sistem Pengelolaan Keuangan	,524	,107	,532	4,899	,000

a. Dependent Variable: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil penelitian (2018) di olah

Tabel 5. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 ^a	.639	.609	.25955

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengelolaan Keuangan , Political Culture, Personal Bacground
 b. Dependent Variable: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil penelitian, (2018)

Tabel 6. Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,291	3	1,430	21,232	,000 ^b
	Residual	2,425	36	,067		
	Total	6,716	39			

a. Dependent Variable: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah
 b. Predictors: (Constant), Sistem Pengelolaan Keuangan , Political Culture, Personal Bacground

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2018)

REFERENSI

- Abdillah dan Djasuli (2008) ***Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Sebagai Pemoderating Hubungan Good Governance Dengan Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan)*** Vol. 4, No. 2, Desember 2008.
- Amalia, Fitri (2013), ***Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo)*** Skripsi. Semarang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Bastian, Indra. (2006). ***Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar***. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Banu. (2003). ***Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah***. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Budiardjo, Miriam, (2008), ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buchori, Mochtar. (2007). ***Perilaku Politik, Budaya Politik, dan Pendidikan***.
- Effendi, Arief. (2003). ***Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara***. Harian Suara Karya.
- Erlina, Sri Mulyani, (2007). ***Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen***, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Ghozali, I. (2006). ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Halim, Abdul. (2004). ***Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah***, Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009). ***Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan***. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2010). ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan***. Jakarta: Salemba Empat
- Jaka, Winarna dan Sri Murni. (2007). ***Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah***, Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 ***Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD)***
- Kantaprawira. (2006). ***Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa***. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mardiasmo. (2004). ***Akuntansi Sektor Publik***, Yogyakarta : Andi. Mahsun, Mohammad. 2006. ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***. Yogyakarta: BPFE.
- Nafidah, Lina N. (2007). ***Pengaruh Kapasitas Individu Terhadap Profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Periode 2004-2009 Melalui Pemahaman Akuntansi***, Makalah Konferensi Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, Surabaya.
- Nordiawan (2006). Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ***tentang pengelolaan keuangan daerah***
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ***tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, ***Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ***tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 ***Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***.

Republik Indonesia. (2000). **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)**

Republik, Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 **tentang Pemerintah Daerah**

Republik, Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 **tentang Keuangan Negara**

Sari (2006) **Pengaruh *Personal Background, Political Background* Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada Dprd Kota/Kabupaten Solok*)**

Wibowo dan Adji Djojo, (2012), **Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Dan Political Culture Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.** Jurnal Akuntansi & Investasi Volume. 13 Nomor. 1, halaman: 44-52, Januari 2012

Winarna, Jaka dan Murni, S. (2007). **Pengaruh Personal Bacground, Political Backround, dan Pengatahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah,** Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Witono B. (2003). **Pengaruh Personal Backround dan Political Culture terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah,** Tesis Pascasarjana UGM Yogyakarta.